

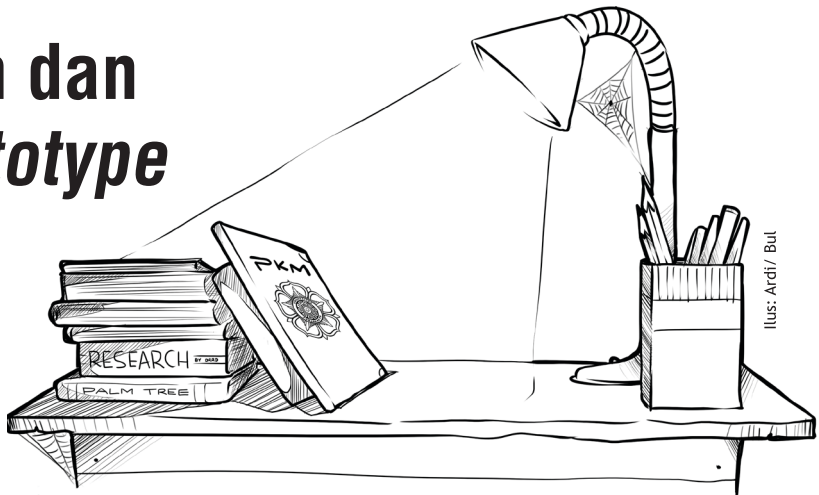
Media Komunitas Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur Pos

Pengembangan dan Kelanjutan *Prototype* PKM di UGM

Oleh: Andira Putra & Anisa Sawu/Hasbuna Dini S

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjadi salah satu ajang bagi mahasiswa untuk menuangkan kreativitasnya dalam berbagai bidang. Namun, kelanjutan dari hasil-hasil PKM masih kerap dipertanyakan.



Ilus: Ardi / But

Dilansir dari <http://hmte.ugm.ac.id>, PKM pertama kali diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Penelitian pada tahun 2001. Ajang ini diselenggarakan guna memberi ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas mereka. Sehingga kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan yang tak kalah penting untuk memperkaya budaya nasional.

Keberlanjutan *Prototype* PKM

Setiap tahunnya UGM telah menyelenggarakan seleksi proposal bagi mahasiswa yang mendaftar PKM, agar kemudian dapat diikuti dalam berbagai kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak sedikit tim-tim perwakilan dari UGM yang pada akhirnya sukses menjuarai kompetisi nasional, seperti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Tak hanya tingkat dalam negeri, banyak pula yang kemudian menjadi juara di berbagai kompetisi bergengsi lainnya di tingkat internasional.

Salah satunya adalah Ivone Marselina Nugraha. Mahasiswi Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia 2014 ini berasama tim PKM-nya melakukan penelitian dengan judul "OPT-CQ (*Optimization of CPO Quality*): Peningkatan Mutu *Crude Palm Oil* (CPO) dengan Penurunan Kadar

Free Fatty Acid (FFA) Menggunakan Teknologi Resin yang Sustainable". Menurut Ivone, keberlanjutan dari PKM yang telah berprestasi tergantung dari tim PKM masing-masing dan universitas yang bersangkutan. "Pengembangan hasil penelitian lebih banyak diberikan oleh departemen. Kalau ke pihak universitas kita yang harus aktif menanyakan. Tapi menurut kami bantuan dari departemen sejauh ini sudah cukup memadai," jelas Ivone. Ahmad Agus Setiawan ST MSc PhD, selaku Kepala Sub Direktorat Kreativitas Mahasiswa menegaskan bahwa seluruh tim PKM yang berhasil didanai Dikti akan mendapatkan dana penelitian sesuai yang dicantumkan di proposal.

Realisasi Penelitian

Ivone menyatakan untuk realisasi PKM ke mahasiswa menurutnya sudah ada. Contohnya PKM bidang pengabdian (PKM-M), yang memang basis mereka adalah pengabdian mahasiswa dalam bentuk aksi nyata. "Untuk data penelitian yang berbasis PKM saya kurang tau lebih lanjut. Karena memang setelah pimnas usai, kontingen PIMNAS UGM XXIX belum pernah dikumpulkan kembali," ujar Ivone.

Ivone menjelaskan untuk topik yang digarap timnya sendiri saat ini masih diteliti di skala laboratorium dan sudah berjalan hingga 80 persen. Kedepannya, supaya dapat diimplementasikan lebih lanjut akan dikembangkan alat untuk skala industri, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara

langsung untuk perancangan alat skala industri. Namun hal ini diprediksi Ivone akan memerlukan waktu yang lama dan alat yang juga harus memadai. "Untuk skala industri ini akan menjadi target kami kedepannya, setelah menyelesaikan pengumpulan data skala laboratorium," tambahnya.

Dukungan untuk Pengembangan dari Pihak Kampus

Pengembangan *prototype* PKM mendapat banyak dukungan baik di tingkat universitas maupun departemen. Pada tingkat departemen bentuk dukungannya berupa alat, bahan dan tempat untuk mengembangkan *prototype* serta melengkapi data. Sementara itu dukungan universitas dalam pengembangan hasil-hasil penelitian PKM pada umumnya lebih diarahkan untuk diikuti dalam lomba lain yang masih sejalan dengan topik PKM masing-masing. Kedepannya, Ivone berharap selain dilombakan, pihak universitas dapat membantu hasil-hasil penelitian PKM ini untuk dapat dipatenkan dan dipublikasikan secara ilmiah.

"Hal ini sudah baik, namun akan lebih baik apabila hasil penelitian PKM diarahkan ke paten dan publikasi ilmiah. Dengan demikian maka tingkat jurnal dan sitasi dari UGM akan naik. Selain itu juga dapat terasip dengan baik, dan diakui sebagai penemuan dari UGM," tutup Ivone.

Bulan demi bulan sudah terlewati dan kini telah memasuki pertengahan bulan April. Ujian tengah semester pun terlampaui. Kegiatan demi kegiatan harus tetap semangat untuk dijalani. Tidak dipungkiri memang semakin berat rasanya karena memang masa depan sudah di depan mata dan apapun yang terjadi harus dijalani dengan pikiran yang terbuka dan sehat.

Menilik hari kesehatan sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 7 april pada kali ini WHO *World Health Organization* mengangkat isu depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang terjadi selama dua minggu atau lebih yang dapat mempengaruhi apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan oleh seseorang akibat beberapa faktor diantaranya kejadian traumatis, kehilangan seseorang atau pekerjaan, kehamilan atau melahirkan, masalah keuangan, merasa dikucilkan, ketergantungan obat-obatan, dan kondisi media jangka panjang dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi.

Depresi tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia dapat mengalami depresi. Depresi juga tidak mengenal batas wilayah, namun tidak dipungkiri semakin padat suatu daerah semakin tinggi angka depresi yang dialami masyarakatnya. Risiko terburuk depresi adalah dapat menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Akan tetapi, depresi tetap bisa diatasi dengan meningkatkan pemahaman kita tentang depresi, sehingga mampu mengurangi stigma akan depresi serta dapat membangkitkan orang-orang yang mengalaminya.

Peduli terhadap sesama merupakan salah satu kunci untuk mengurangi tingkat depresi. Dengan tidak menyepikan permasalahan setiap orang dan mau mendengarkan serta saling memahami dapat membangun serta menciptakan keharmonisan hubungan setiap individu. Diimbangi dengan selalu menjaga kesehatan raga dengan pola hidup sehat dapat memunculkan pikiran serta emosi positif dalam diri. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat raga kuat.

Penjaga Kandang



Perlukah Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Ditinjau Ulang?

D i awal tahun 2017 lalu, mahasiswa UGM kembali dikejutkan dengan diterapkannya Peraturan Rektor No 1 Tahun 2017 mengenai Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, secara otomatis posisi BEM KM akan disejajarkan dengan UKM. Padahal, jika ditelisik lebih mendalam, kedua organisasi tersebut memiliki peran dan wewenang yang berbeda. Beragam reaksi pun mencuat dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM KM maupun UKM seiring diterapkannya peraturan tersebut. Segelintir orang tak merasakan imbasnya, namun tak sedikit pula yang merasa peninjauan kembali perlu dilakukan.

Pihak rektorat sebagai pemangku kebijakan mengutarakan bahwa penetapan peraturan rektor tersebut telah melalui proses panjang melalui sosialisasi selama satu tahun dan didasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Pendidikan nomor 12 tahun 2012 mengenai pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian masyarakat. Peraturan tersebut dinilai tepat karena UGM telah mencanangkan adanya sekretariat bersama (Sekber) yang menaungi seluruh organisasi kemahasiswaan menurut bidangnya masing-masing. Tak seharusnya ada satu organisasi yang lebih istimewa dibandingkan organisasi yang lainnya. Begitu pula dengan porsi tugas dan wewenang organisasi mahasiswa yang sama rata tanpa ada salah satu yang mendominasi.

Selain itu, terlepas dari aturan organisasi kemahasiswaan yang baru, hal yang seharusnya menjadi pertimbangan UGM adalah keterlibatan seluruh elemen sivitas akademika dalam pengambilan suatu keputusan. Seolah tak berkaca dari pengalaman sebelumnya, pengambilan keputusan sepihak tanpa audiensi yang baik pastinya akan menuai beragam opini publik. Kewajiban universitas untuk memberikan transparansi pun terabaikan. Mahasiswa sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung juga diharapkan turut serta melakukan pengawasan terhadap isu-isu kampus yang sedang berkembang, sehingga dapat terwujud suatu langkah pembuatan kebijakan yang ideal.

Tim Redaksi

Perangi Hoax dari Diri Sendiri

Hoax atau pemberitaan palsu kerap kali meresahkan masyarakat. Istilah hoax yang pertama kali diperkenalkan oleh warganet Amerika ini sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengar agar memercayai sesuatu hal yang merupakan kebohongan. Bagaikan pesan berantai yang tak berujung, hoax dengan mudah dan cepat menyebar melalui jalur situs daring, aplikasi *chatting*, dan sosial media. Padahal ketiga hal yang merupakan pintu gerbang masuknya berita hoax tersebut, saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi hampir setiap orang. Maka alasan masifnya penyebaran hoax yang terjadi saat ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

Hoax bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia maya. Namun, hoax yang akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, seringkali berita hoax ini menyinggung isu sensitif yang dapat memprovokasi masyarakat. Ironisnya, tidak sedikit masyarakat yang langsung percaya tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kebenaran dari isu tersebut, bahkan saling membagikannya baik melalui *likes* maupun *share* di sosial media, sehingga hoax dapat secara cepat menyebar.

Pembuat berita hoaxpun tidak hanya sekedar *iseng* dalam membuat dan mempostingnya. Berkat hoax yang mereka ciptakan, tidak sedikit penghasilan yang bisa didapatkan. Mengutip dari Tempo.co Solo, Koordinator Masyarakat Indonesia Anti Hoax Solo Raya, Niken Satyawati, mengatakan bahwa motif utama pembuat hoax adalah persoalan ekonomi. Caranya adalah dengan mengejar jumlah “klik” untuk mendulang iklan. Artinya, pendapatan mereka bergantung pada *rating* pengunjung. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan dengan cara membuat berita yang mengehebohkan. Di samping untuk lahan “bisnis”, beberapa oknum membuat hoax karena keberpihakan mereka kepada salah satu pihak, sehingga hoax dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak lain.

Semakin banyaknya hoax di Indonesia mengindikasikan bahwa mereka (re: pembuat berita hoax) merasa “bisnis berita hoax” memang cukup menjanjikan di Indonesia. Budaya malas membaca secara keseluruhan dan kurang kritisnya pembaca dalam menyikapi informasi yang diterima, menjadi penyebab masyarakat Indonesia rentan terkena hoax. Hal tersebut menjadi bukti bahwa si pembuat berita bukan satu-satunya pihak yang terlibat, namun masyarakat juga mempunyai andil di dalamnya. Karena selain menjadi sasaran, masyarakat juga berpotensi menjadi penyebar.

Lalu sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Pembuat berita atau justru masyarakat yang secara sadar maupun tidak, sering membagikan informasi atau berita yang sebenarnya masih abu-abu? Pembuat berita tentunya, karena mustahil masyarakat membagikan berita apabila pembuat hoax tidak menciptakannya. Namun jika ditilik lebih lanjut, kebiasaan “asal sebar” yang membudaya di masyarakat sebenarnya juga merupakan suatu kesalahan. Masyarakat cenderung langsung percaya dengan apa yang dibacanya dan dengan maksud “saling *share* info” membagikannya kepada orang lain, begitu seterusnya sampai kemudian menjadi kehebohan.

Berita hoax mungkin tidak akan berhenti bermunculan. Namun dengan membiasakan diri untuk tidak langsung *share* informasi yang belum jelas kebenarannya, setidaknya ruang lingkup penyebaran hoax bisa dipersempit. Hoax merupakan salah satu ancaman bagi masyarakat di era teknologi, karena meluasnya hoax dapat dengan mudah memprovokasi, bahkan jika menyangkut isu sensitif misalnya saja SARA, dapat memicu timbulnya konflik. Sebagai pembaca kita juga bertanggung jawab atas semakin maraknya hoax, karena timbulnya hoax bukan hanya karena si pembuat, namun karena didukung juga oleh penyebar yang notabene adalah diri kita sendiri.

Nama : Choirunnisa
Jurusan : D3 Akuntansi
Angkatan : 2016
Editor : Hanum Nareswari

Peraturan Rektor No 1 Tahun 2017 : Menyetarakan atau Menyamarkan?

Oleh: M. Zahri Firdaus, Namira Putri/ Arina Nada

Awal tahun ini rektorat kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Bagaimana tidak, kebijakan yang baru diterapkan beberapa saat langsung diminta untuk ditinjau kembali.

Peraturan Rektor No 1. Tahun 2017 membahas tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Salah satunya peran organisasi yang berfungsi untuk memperkuat jiwa kepemimpinan dan wadah pengembangan bakat minat mahasiswa. Namun hal ini justru menimbulkan beragam reaksi, terutama dari kalangan organisasi mahasiswa.

Beda BEM dan UKM

Diterapkannya peraturan rektor mulai 3 Januari 2017 membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap keberadaan BEM maupun UKM. Pada pasal 4 disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan dapat berbentuk UKM atau komunitas dan berada di tingkat universitas atau tingkat fakultas/sekolah.

Menurut Alfath Bagus Panuntun (Politik dan Pemerintahan '13) selaku Ketua BEM KM UGM, adanya peraturan tersebut menyebabkan posisi BEM KM sama rata dengan UKM, padahal keberadaan BEM sesungguhnya bukan sebagai sarana terbatas dalam kapasitas UKM. Alfath menegaskan bahwa BEM dan UKM bergerak dalam ranah yang berbeda. "Teman-teman UKM fokusnya seni, menulis, pengembangan minat bakat, tapi ranah BEM bukan di sana. Ranah BEM adalah pergerakan mahasiswa yang bergerak sebagai pemerintahan mahasiswa, maka tugas dan porsinya lebih besar. Ini kan, ibaratnya mengelola negara," terangnya.

Dengan dilaksanakannya peraturan tersebut juga berdampak pada kinerja BEM KM UGM. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemilihan umum mahasiswa. Jika BEM KM disamaratakan dengan UKM, maka pemilihan ketua hanya terbatas pada lingkup UKM. Selain itu akan muncul persepsi ketua BEM tidak layak disebut Presiden Mahasiswa, karena

hanya merupakan ketua UKM saja.

Hal yang hampir serupa juga diucapkan oleh Bima Indra (Perencanaan Wilayah dan Kota '15) selaku ketua UKM Difabel, terkait peran BEM KM. Menurutnya, jika posisi BEM dijadikan setara dengan UKM, maka ruang gerak berpolitik mahasiswa akan semakin terbatas. "BEM ini sebagai lembaga eksekutif, yang memiliki sifat *controlling* dan *monitoring* kebijakan rektorat baik yang fisik maupun nonfisik, kalau tidak ada lembaga sekelas BEM yang memonitoring, lalu siapa lagi?" ujar Bima. Selain itu, ia juga menambahkan, jika peran mahasiswa melalui BEM dibatasi, kasus seperti *money politic* akan sering terjadi, karena tidak ada kontrol langsung dari mahasiswa.

Mencari jalan tengah

Sebagai sorotan utama dalam peraturan rektor tersebut, BEM dan UKM tentu tak berhenti mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Salah satunya melalui forum bersama MWA (Majelis Wali Amanat). UKM tidak mau berada di bawah BEM, sehingga

harus dicari jalan tengah antara keduanya. "Jalan tengahnya teman-teman UKM harus tetap mengakui pemerintahan mahasiswa, tetapi dalam 'kamar' yang lain kita tidak akan mengintervensi pekerjaan teman-teman UKM," ujar Alfath.

Dari segi UKM, posisi BEM tidak membawahi UKM. Namun, dengan adanya Forkom maka Forkom dapat bersinergi sebagai penghubung UKM dan BEM. Hal ini dapat menjadi jalan tengah dari masalah tersebut. Forkom akan mengadvokasi UKM sedangkan BEM akan mengadvokasi peorangan sebagai mahasiswa UGM.

Keputusan rektor yang dinilai kurang melibatkan mahasiswa inipun menjadi kritik. "Kalau dilihat peraturan rektor, rektorat memutuskan sendiri dan tidak ada peran aktif mahasiswa baik melalui BEM maupun UKM itu sendiri," tambah Bima. Untuk kedepannya, diharapkan dalam pengambilan kebijakan perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.



Ilus: Rofi/ Bul

Ranah BEM adalah pergerakan mahasiswa yang bergerak sebagai pemerintahan mahasiswa, maka tugas dan porsinya lebih besar. Ini kan, ibaratnya mengelola negara.”

- Alfath Bagus Panuntun (Ketua BEM KM UGM)



Landasan Rektorat Mengenai Penataan Organisasi Kemahasiswaan UGM

Oleh: Nindy Oktavia, Nada Celesta/ Ilham R

Upaya rektorat menyetarakan kedudukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Senat Mahasiswa dengan UKM semakin jelas. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 yang mengakui bahwa organisasi kemahasiswaan hanya sebatas UKM dan komunitas saja.

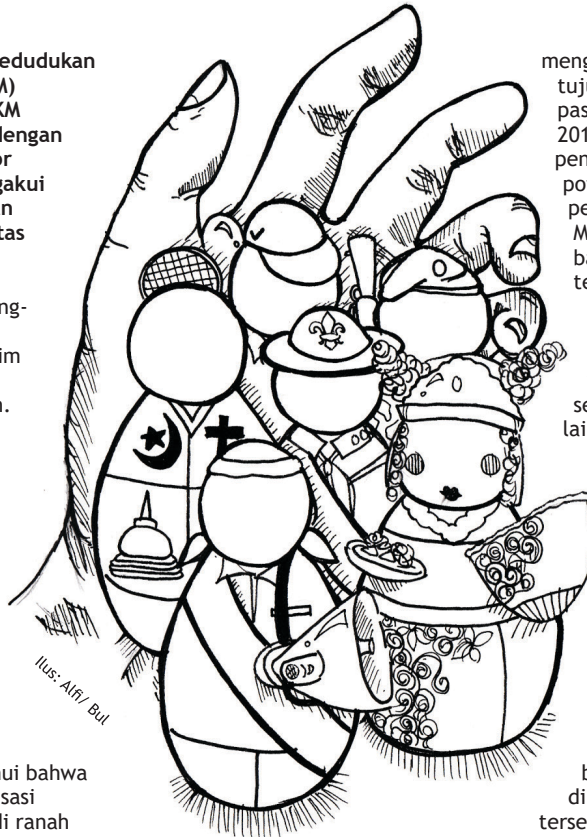
Rektorat menggunakan Undang-undang (UU) Pendidikan sebagai acuan dan mengklaim telah melibatkan mahasiswa dalam proses formulasi kebijakan. Melalui peraturan tersebut, hanya ada dua jenis organisasi kemahasiswaan yang diakui oleh universitas yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan komunitas. Hal ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa peraturan ini akan menghambat pergerakan mahasiswa. Sehingga, pertimbangan pihak rektorat dalam pembuatan peraturan ini kemudian dipertanyakan.

Tidak perlu pengistimewaan

Saat ini, seperti yang diketahui bahwa BEM dan Senat merupakan organisasi mahasiswa yang diklaim berada di ranah eksekutif mahasiswa. Hal ini disebabkan ranah BEM adalah pergerakan mahasiswa yang bergerak sebagai pemerintahan mahasiswa. Oleh karena itu, Peraturan Rektor no. 1 tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan UGM menyisakan tanda tanya mengenai letak kedudukan organisasi mahasiswa yang bersifat pemerintahan ini setelah disamaratakan dengan UKM dan komunitas.

Penolakan datang dari Alfath Bagus Panuntun (Politik dan Pemerintahan '13) selaku ketua BEM KM UGM. "Di level rektorat, saya bisa melihat ini sebagai upaya depolitisasi. Upaya untuk memakan pergerakan mahasiswa. Kita hanya dituntut untuk mengurus pekerjaan internal mahasiswa, berkonflik dengan mahasiswa, sehingga kita kehilangan daya kritis untuk mengawal kebijakan dari pemerintah, persoalan-persoalan kebangsaan," keluhnya.

Penolakan BEM KM ini ditanggapi oleh Senawi, Direktur Kemahasiswaan UGM, bahwa UGM selalu berusaha



mengembangkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertera pada pasal 5 UU Pendidikan nomor 12 tahun 2012. Pasal ini berisikan mengenai tujuan pendidikan tinggi untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Mengacu pada UU tersebut, ia berujar bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak ada keistimewaan kepada pihak tertentu.

Senawi juga menyatakan bahwa dalam pengembangan mahasiswa tersebut, UGM telah mengakomodasi sekretariat bersama (Sekber), antara lain Sekber Kerohanian, Sekber

Olahraga, Sekber Kesenian, dan Sekber Khusus. Sedangkan untuk organisasi mahasiswa seperti BEM, ia menyatakan bahwa itu termasuk dalam Sekber Khusus. "Dia (BEM, red) sebagai bagian dari Sekber Khusus, yang di dalamnya ada BEM KM, pramuka, Menwa, dimana itu semua kan hal-hal khusus," jelasnya.

Selain itu, saat disinggung mengenai kedudukan BEM yang dianggap memiliki porsi tugas lebih besar, Senawi justru mempertanyakan di mana letak keistimewaan organisasi tersebut. "Apa ada pernyataan bahwa BEM itu lebih hebat daripada UKM yang lain? Dasarnya apa? Kita kan mengacu pada aturan perundangan saja," ujarnya.

Sudah melibatkan mahasiswa

Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2017 tersebut diakui Senawi merupakan produk yang telah melalui proses yang cukup panjang karena telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Proses ini mencakup antara lain *workshop* dengan para pembina dan *sharing* dengan mahasiswa. Hasilnya kemudian diproses di tingkat pimpinan universitas hingga akhirnya resmi dikeluarkan pada tahun 2017.

Peran mahasiswa juga disebutkan tidak luput dari proses pertimbangan pembuatan peraturan rektor ini. "Waktu itu kita sudah pernah sosialisasi di tahun 2016 atau 2015, ya. Isu-isu yang ada juga sudah kita lempar ke mahasiswa juga," terang Senawi.

"Kalau bagi kami, bahwa peraturan rektor itu adalah sesuatu yang sudah final dan itulah yang diharapkan UGM," pungkasnya.



Apa ada pernyataan bahwa BEM itu lebih hebat daripada UKM yang lain? Dasarnya apa? Kita kan mengacu pada aturan perundangan saja."

- Dr Drs Senawi M P (Direktur Kemahasiswaan UGM)



Syahdunya Malam Jogja Bersama Jazz Mben Senen

Oleh: Aulia Hafisa, Ihsan Nur R/ Hadafi F R

Jazz seringkali dianggap sebagai tontonan mewah nan megah. Namun, Jazz Mben Senen hadir untuk meyuguhkan jazz bagi semua kalangan sebagai pengantar semangat dan rileksasi di samping mengembangkan kreativitas para pemainnya.

Malam itu (3/4) gerimis menyelimuti Kota Jogja. Jalan raya sudah tampak sepi oleh pengendara. Kontras dengan kesunyian jalanan, terlihat keramaian di halaman Bentara Budaya kala itu. Aku melihat tenda dan kursi-kursi berdiri tegak menyambutku. Panitia sibuk mondar mandir mengangkat peralatan yang dibutuhkan. Tiga buah *standing microphone* berdiri apik tepat di tengah bagian panggung menunggu untuk digunakan. Menjelang pukul sepuluh, terdengar suara *check sound* yang menandakan segera dimulainya acara.

Jazz Mben Senen merupakan sebuah pertunjukan musik jazz yang diadakan setiap hari senin. Frasa "mben senen" berasal dari Bahasa Jawa yang berarti setiap Senin. Malam itu, acara di buka oleh gurauan-gurauan lucu tiga pemandu acara yang akhirnya mencairkan suasana. Tiga penampil pertama memecah keriuhan di antara penonton. Mereka adalah sang *keyboardist*, *bass*, dan *drummer*. Alunan jazz improvisasi ala penampil yang satu ini memang terasa halus dan menenangkan jiwa. Atmosfer hangat dan rileks tercipta seperti iringan pengusir penat di awal minggu.

Interaksi yang dekat terjalin antara pengunjung dan musisi yang berdiri di atas pentas. Musisi-musisi jazz tersebut secara terbuka mengundang pengunjung untuk menunjukan bakatnya dalam *Jam Session*. *Jam session* pada Jazz Mben Senen adalah sesi berkumpulnya musisi-musisi jazz untuk mempertunjukan kebolehannya di atas panggung secara spontan. Tidak hanya seniman saja yang diajak berimprovisasi, tetapi juga para pengunjung yang



Foto: Bagus/ Bul

awalnya hanya duduk diam terpaku oleh merdunya melodi-melodi yang diciptakan sang seniman.

Sejarah terbentuknya Jazz Mben Senen ini tidaklah singkat. Berawal dari komunitas jazz yang manggung di kafe tidak tetap di tahun 90an, hingga akhirnya mendapatkan tempat tetap di Bentara Budaya sejak tahun 2009. Adanya Jazz Mben Senen ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, terutama senior. "Ini semua bantuan dari Warta Jazz (komunitas jazz di Jogja, -red), Djaduk Ferianto (senior, -red) dari padepokan, Pak Bambang Paningrot (pemilik studio musik tempat komunitas berlatih, -red), terus Romo Shindu (pemilik Bentara Budaya, -red), jadi ya kita independen tapi tidak terlepas dari dukungan banyak pihak," tutur Anggrian, salah seorang anggota komunitas.

Penikmat maupun pemain musik dari seluruh lapisan masyarakat secara terbuka dapat bergabung dengan Komunitas Jazz Jogja tanpa syarat jika memang mencintai jazz. Sejauh ini, musik jazz dipandang masyarakat sebagai hobi yang megah nan mewah. Faktanya, musik jazz berasal dari musik tradisional masyarakat Amerika. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, pertunjukannya identik dengan suasana yang *glamour* dan setelan yang nyentrik. Jazz Mben Senen berusaha mendekatkan dan mengubah pandangan jazz, bahwa sesungguhnya jazz dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. "Ya menurut saya sendiri ini bagus ya karena musik jazz mampu diterima semua kalangan yang beragam, dan itu terlihat dari penonton di sini (Jazz Mben Senen, -red)," ungkap Agata, pengunjung setia Jazz Mben Senen.

Di bulan April ini, Jazz Mben Senen sudah memasuki lebih dari tiga ratus episode. Tiap kali tampil, komunitas tersebut memilih tema yang berbeda. Bulan ini, tema yang diusung adalah Endang Soekamti. Perpaduan lagu Endang Soekamti yang diimprovisasi dengan *genre* jazz menutup malam dengan sempurna.



Foto: Fadhlul/ Bul

Target Iklan kamu? Mahasiswa?

Hanya kami
yang dekat
dengan mereka

SURAT KABAR MAHASISWA

**BULAK
SUMUR**

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Contact Person :
Sanela

082242865671



1 SKM BULAKSUMUR UGM
**TEMPAT
4 MEDIA**



Foto: Bayu/ Bul



Minimnya Tingkat Keamanan Menara Masjid Kampus UGM

Oleh: Agnes Vidita A, Trishna Dewi W/ Risa Kartiana

Masjid Kampus (Maskam, -red) UGM sedang dalam tahap pembangunan menara sebagai tempat *speaker* untuk adzan. Menara Maskam yang mulai dibangun tahun 2013 ini juga akan diberi teropong untuk melihat pemandangan alam sekitar serta melihat *hilal* pada awal Ramadan. Saat ini, menara yang dilengkapi tangga tersebut sudah dapat dinaiki, akan tetapi tingkat keamanannya masih belum memadai. “Menurut saya tangga di bawah aman, tapi tangga bagian atas tidak ada pegangannya jadi sangat bahaya jika anak kecil naik,” ungkap Aeni (Sastra Indonesia ‘16), salah satu pengunjung menara Maskam.

Menanggapi rendahnya fasilitas pengamanan menara tersebut, Wardani selaku Ketua Takmir Maskam UGM mengatakan, “Itu karena sekarang ini belum selesai.” Meski demikian, hingga kini belum ada petugas keamanan yang mengawasi pengunjung yang menaiki menara. Wardani menambahkan bahwa rencananya menara akan dilengkapi dengan fasilitas *lift*. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko yang berbahaya bagi pengunjung.

Selain *lift*, menara ini akan dilengkapi fasilitas pengaman lain. Rencananya, bangunan tersebut akan dilapisi dengan GRC (*glassfibre reinforced cement*), yakni material yang terbuat dari campuran semen dan pasir (agregat halus) yang diperkuat dengan *glassfibre alkali resistant*. Material tersebut akan melapisi menara, sehingga menara akan tertutup sempurna, kecuali bagian puncaknya.

Jika sudah selesai, menara Maskam akan dibuka untuk umum dan dijaga oleh petugas keamanan. Namun, penyelesaian proses pembangunan tersebut belum dapat dipastikan. Jadi, Wardani berharap, untuk sementara ini, pengunjung dapat menjaga diri dan lebih berhati-hati.

Foto: Anisa/ Bul



Fasilitas Mahasiswa, Fisipol Buat *Drop Zone* Ojek

Oleh: Akyunia Labiba / Aninda Nur H

Persoalan mengenai sarana-prasarana kampus seolah tak ada habisnya. Salah satu persoalan yang sering terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) adalah banyaknya ojek yang menurunkan atau menjemput penumpang di sembarang tempat. Meski terdengar sepele, hal ini berdampak pada padatnya lalu lintas di sekitar kampus.

“Saya melihat ini *kok* mengganggu pengendara yang lain. Saya kira, itu ada *space* kenapa nggak kita fasilitasi saja?” tutur Paminto Adhi, Kepala Kantor Administrasi (KKA) Fisipol UGM. Melihat keadaan yang memprihatinkan, KAA berinisiasi membuat *drop zone*. *Drop zone* merupakan ruang khusus berbentuk persegi berwarna hijau yang digunakan sebagai lokasi berhenti ojek. *Drop zone* yang baru saja dibuat pada pertengahan Maret, kini sudah difungsikan secara baik dengan memilih lokasi di titik pertemuan pintu masuk antara Fakultas Hukum (FH) dan Fisipol.

Drop zone dinilai menjadi fasilitas terbaru yang tepat untuk direalisasikan. Hal ini sebagai upaya mengatasi kepadatan lalu lintas di sekitar Fisipol dan memfasilitasi mahasiswa yang banyak melakukan mobilisasi menggunakan ojek. Dengan adanya *drop zone* ini, diharapkan pengemudi ojek lebih tertib dalam melakukan kegiatan serta mampu mendorong terwujudnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus Fisipol.

Tanggapan positif terhadap keberhasilan realisasi *drop zone* mulai terlihat melalui banyaknya *like* pada kiriman di sosial media, seperti Facebook dan Instagram. “Ke depannya, dalam waktu dekat akan ada *drop zone* yang dikhususkan bagi mobil. Dalam perencanaan, *drop zone* mobil tersebut akan dibuat pada pintu sisi utara gedung Fisipol,” pungkas Paminto.

FOLLOW US!



@bkt3192w



skmugmbul



SKM UGM Bulaksumur



@skmugmbul



Kunjungi juga
website resmi Kami di
bulaksumurugm.com



VISIT
US